

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nagari yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 72 Tahun 2004, Nagari atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka Nagari diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nag).

RPJMNag Nagari Kapujan Koto Berapak ini merupakan rencana strategis Nagari Kapujan Koto Berapak untuk mencapai tujuan dan cita-cita Nagari. RPJMNag tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Sepirint ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Wali Nagari yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Nagari dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan, agar program pembangunan di Nagari sejalan dan selaras dengan program Pembangunan Daerah. Pemerintah Nagari Kapujan Koto Berapak saat ini telah memiliki Rencana Pemabngunan Jangka Menegah RPJMNag 2018-2024. Dengan telah di

lantiknya Sdr. Supardi, sebagai Wali Nagari Kapujan Koto Berapak terpilih periode 2018-2024 pada tanggal Mei 2018 terhitung setelah di lantik, Wali Nagari terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMNag) 6 (Enam) tahun berikutnya sebagai acuan /refrensi arah dan kebijakan pembangunan di Nagari.

RPJMNag Nagari Kapujan Koto Berapak merupakan penjabaran **Visi, Misi** dan **Program Wali Nagari**. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 78,79 dan 80 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Nagari.

Pengertian

Istilah dan singkatan dalam dokumen :

- a) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- b) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
- c) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- d) Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
- e) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- f) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g) Pemerintahan Nagari adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- h) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- i) Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- j) Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Nagari bersama dengan Wali Nagari.
- k) Keputusan Wali Nagari adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
- l) RPJMNag : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
- m) RKPNa : Rencana Kerja Pembangunan Nagari
- n) RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- o) RAPBNag : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- p) DURKPNagari : Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari
- q) Perencanaan adalah Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada
- r) Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
- s) Arah pembangunan daerah adalah Strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Nagari
- t) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
- u) Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan
- v) Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga – lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran / kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh lembaga Nagari.
- w) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJMNagari adalah dokumen perencanaan pembangunan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun Nagari dalam wilayah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Nagari antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);¹
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Undang undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Nagari / Kelurahan;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal

31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016
28. Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Dana Desa
29. Surat Edaran No. 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Tentang Rencana Penyusunan

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 s/d 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1 Maksud disusunnya RPJMNag Nagari Kapujan Koto Berapak tahun 2018-2024 adalah memberikan arah bagi pemerinah Nagari, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Nagari yang terpadu dengan tujuan daerah sesuai visi, misi dan arah pembanguna Nagari yang telah di sepakati bersama sehingga menjadi efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan responfsip terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga maksudkan untuk memberikan arah terhadap pengelolaam keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, kebijakan umum Nagari dengan rencana kerja dalam kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang bersipat indikatif selama 6 (enam) tahun kedepan.
- 2 Sedangkan tujuan disusunnya RPJMNag Nagari Kapujan Koto Berapak Tahun 2018-2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana strategis pembangunan pemerintah Nagari dan sebagai dokumen perencanaan lainnya.

1.4 Mamfaat

Perencanaan pembangunan Nagari merupakan hal penting dalam menentukan arah, lebih menjamin kesinambungan Pembangunan , Sebagai rencana induk pembangunan Nagari yang merupakan acuan Pembangunan Nagari, Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Nagari.

- a) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- b) Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian dokumen RPJMNag akan menjadi sebuah pedoman induk pembangunan dan dijadikan sebagai bahan acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, karena merupakan singkronisasi perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, dan Nagari yang jga merupakan Acuan atau Pedoman dalam pembangunan Nagari secara sistematis, terukur dan terencana.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI NAGARI

2.1. Sejarah Nagari

2.1.1. Sejarah Nagari

Nagari Kapujan Koto Berapak merupakan pemekaran dari Nagari Induk yaitu Nagari Koto Berapak yang dimekarkan menjadi Pemerintah Nagari Baru pada bulan Desember tahun 2011 yang dulunya 4 (Empat) Nagari dan sekarang menjadi 17 nagari yang ada di Kecamatan Bayang

Kapujan Koto Berapak merupakan bagian dari kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah $\pm 5.000 \text{ m}^2$ Kenagarian Kapujan Koto Berapak kondisi tanah yang datar dan subur di kelilingi oleh daerah perbukitan dan di apit daerah aliran sungai yaitu Aliran Batang Bayang dan Aliran Bayang Bungo. Nagari Kapujan Koto Berapak 2512 Jiwa dengan Jumlah Laki Laki + 1230 dan Perempuan ± 1273 Jiwa.

2.2 Peta dan Kondisi Nagari

2.2.1. Demografi

Narasi tentang kondisi umum Nagari Kapujan Koto Berapak

Nagari Kapujan Koto Berapak mempunyai luas wilayah lebih kurang 5.000 m^2 yang terdiri dari :

1. Kawasan Pertanian Seluas 230 Ha
2. Kawasan Pemukiman Penduduk Seluas 185 Ha
3. Tanah Pekarangan / Perumahan Seluas 10 Ha
4. Kawasan Hutan Rakyat Seluas 50 Ha
5. Kawasan Hutan Lindung Seluas 150 Ha
6. Panjang Sungai 12.4 Km
7. Panjang Jalan Kabupaten Sepanjang 2 Km
8. Tempat rekreasi seluas 0 Ha
9. Tempat yang dimanfaatkan untuk Sarana olah raga seluas 0 Ha

Nagari Kapujan Koto Berapak terdiri dari 2 kampung yakni

1. Kampung Kapujan
2. Kampung Parit Rantang

2.2.2. Keadaan Sosial

Narasi tentang keadaan Sosial Nagari Kapujan Koto Berapak

Masyarakat Kapujan Koto Berapak merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang memiliki solidaritas dan jiwa gotongroyong yang memiliki adat dan budaya yang sama dengan nagari induknya yaitu Nagari Koto Berapak. Inilah yang barangkali sistem sosial budaya Kapujan Koto Berapak dalam perkembangannya mewariskan system adat dan nilai budaya berdasarkan Adat Budaya Minang Kabau yang berazas “ ***Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*** ” sebagaimana wujud kecintaan rakyat terhadap sejarah negerinya.

Adapun Keadaan Sosial Nagari Kapujan Koto Berapak

Tabel 2.1 Kondisi Sosial Nagari

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Kependudukan - Jumlah Penduduk - Jumlah KK - Jumlah Laki Laki 0 – 15 Tahun 16 – 55 Tahun - Diatas 15 Tahun - Jumlah Perempuan 0 – 15 Tahun 16 – 55 Tahun - Diatas 55 Tahun	2.512 592 1239 413 514 312 1273 424 529 320	
2	Kesejahteraan Sosial - Jumlah KK Kaya - Jumlah KK Sedang - Jumlah KK Miskin	91 129 372	
3	Tingkat Pendidikan		

	a. Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/Strata SI (Sarjana)	117 151 501 1624 119 12	
4	Mata Pencarian Penduduk a. Buruh Tani b. Petani c. Peternak d. Pedagang e. Tukang Kayu f. Tukang Batu g. Penjahit h. PNS i. Pensiunan j. TNI/Polri k. Perangkat Nagari l. Pengrajin m. Industri Kecil n. Buruh Industri o. Lain - Lain	57 443 5 29 21 27 10 19 9 5 12 	
5	Agama a. Islam b. Kristen c. Protestan d. Hindu e. Budha f. Konghucu g. Aliran Kepercayaan	2512	

2.2.3. Keadaan Ekonomi

Narasi tentang keadaan ekonomi nagari Kapujan Koto Berapak

Masyarakat Kapujan Koto Berapak pada umumnya adalah masyarakat agraris yang bermata pencarian sebagai petani, di lain masyarakat bermata pencarian sebagai berikut:

- a. Buruh Tani
- b. Petani
- c. Peternak
- d. Pedagang
- e. Tukang Kayu
- f. Tukang Batu
- g. Penjahit
- h. PNS
- i. TNI/Polri
- j. Perangkat Nagari
- k. Lain Lain

Penduduk Kapujan Koto Berapak sekarang lebih memprioritas ekonomi pada sector pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Tanaman perkebunan yang berkembang pesat di Nagari Kapujan Koto Berapak sekarang adalah Karet, Coklat, Pinang, Pala yang dimiliki pasaran dunia. Sementara dipasar nasional ada tanaman Multikultur : Padi, Jagung, Kacang-kacangan, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan lain sebagainya. Disektor pertambangan masyarakat Inderapura Barat Memanfaatkan aliran sungai yang ada di Pasa Malintang dengan menambang Bahan Galian C berupa pasir dan koral dan Batu

2.2.4 Topografi

Berdasarkan kondisi topografinya wilayah Nagari Kapujan Koto Berapak dikategorikan sebagai berikut :

1. Ketinggian 0-60 meter diatas permukaan laut, memiliki luas sebesar 425 Ha atau 10 % dari luas wilayah. Sedangkan kemiringan lahan di Nagari Kapujan Koto Berapak sangat bervariasi dan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan
2. Tingkat kemiringan 21-80° merupakan tingkat kemiringan Wilayah yang paling luas.

2.2.5 Klimatologi

Nagari Kapujan Koto Berapak termasuk wilayah yang beriklim tropis, dengan musim , yakni kemarau (April-September) dan musim hujan (Oktober- Maret) dengan temperature suhu udara rata-rata berkisar antara 21,03°C-32,78° C, dimana suhu maksimum terjadi pada bulan oktober dan November dengan suhu 33,8° C, serta suhu terendah yang mencapai 17° C.

Dilihat dari letak geografis wilayah dengan batas - batas alam yang cukup strategis karena batas alam berupa kali dan batas perkebunan warga sebagai batas wilayah dusun dan batas wilayah Nagari yang merupakan pembatas antar Nagari tetangga.

2.3 Kelembagaan Nagari

2.3.1 Kondisi Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari Kapujan Koto Berapak terdiri dari Pemerintah dan BAMUS, sedangkan Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkatnya

2.3.2. Pembagian Wilayah

Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 17 Nagari yang ada dikecamatan Bayang sekarang yang mempunyai jarak 22 km dari kota kabupaten. Kecamatan Bayang sendiri merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara Geografis Nagari Tengah sendiri terletak diperbatasan :

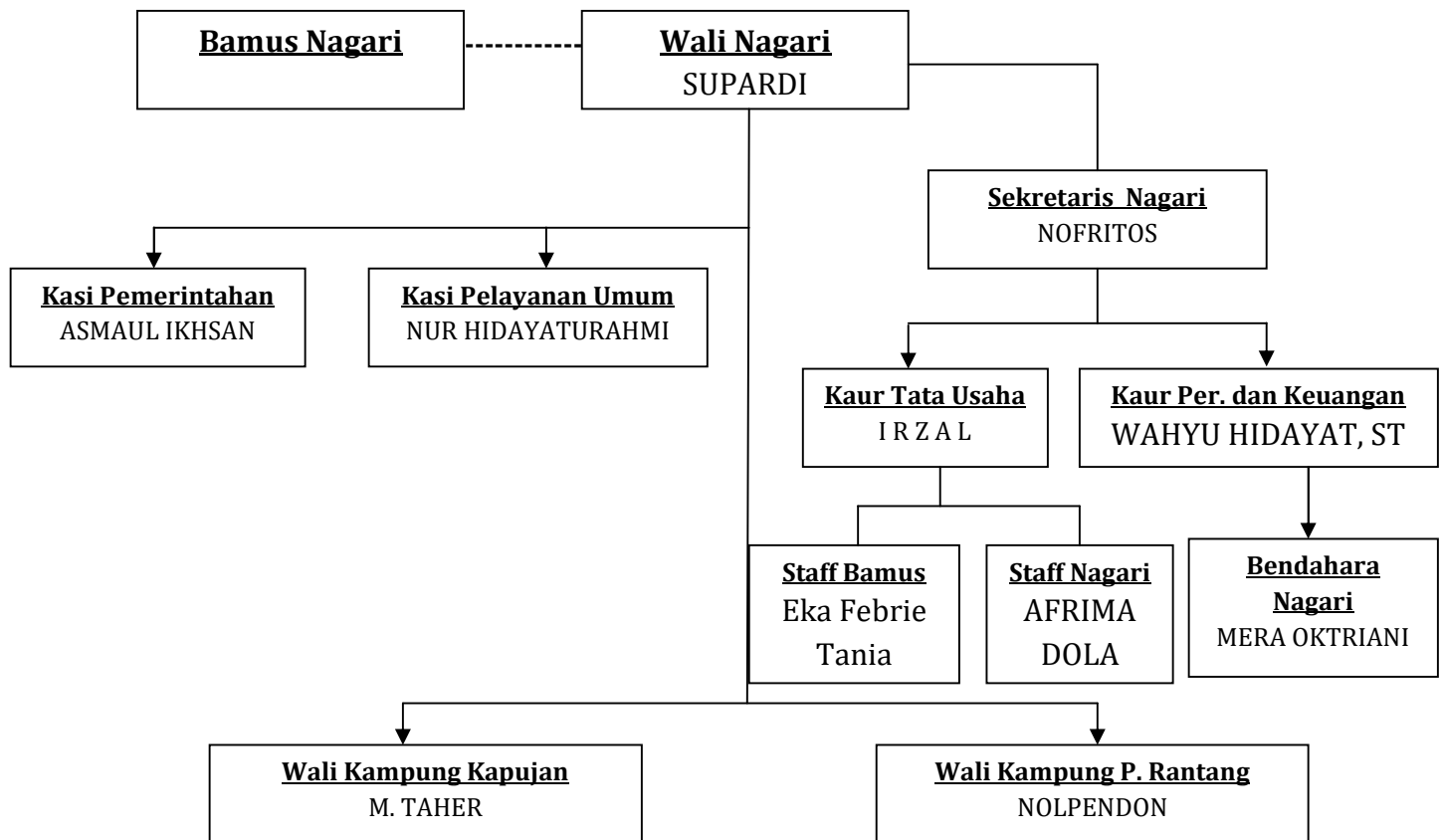
- Sebelah Barat berbatas dengan Kec. Koto XI Tarusan
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Kubang Koto Berapak
- Sebelah Utara berbatas dengan Kec. Koto XI Tarusan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Kapencong Lubuk Gambir

Letak geografis tanahnya Dataran, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah Petani

Nagari Kapujan Koto Berapak terdiri dari 1 Wali Nagari, 5 Orang Anggota Bamus, 1 orang Sekretaris Nagari , 2 Orang Kasi, 2 orang Kaur, 1 Orang Staff Nagari, 1 Orang Staff Bamus dan 2 Orang kepala Kampun

2.3.3. Struktur Organisasi Nagari

Sebagai sebuah Nagari, sudah tentu struktur kepemimpinan Nagari Kapujan tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :



Nama BAMUS Nagari Kapujan

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	HERIZON	Ketua	Alim Ulama
2	FEBRINO, S.PdI	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	FAKHRUL ROZI	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	AFRIKO PUTRA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan	Pemuda

		Kemasyarakatan	
5	SRI HARTATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kandung

Tim LPMN Nagari Kapujan

No	Nama	Jabatan
1	NGATMUN	Ketua Satu
2	EMRIZAL	Ketua Dua
3	ERMANTO	Ketua Tiga
4	RUSWARMAN	Sekretaris
5	AL HADID	Bendahara

2.4. Dinamika Konflik

Adapun Dinamika Konflik adalah sebagai berikut :

No	Lembaga	Masalah	Potensi	Solusi
1	Pemerintahan Nagari	Bamus belum Mampu merumuskan Aturan-aturan Nagari (Pernag)	Struktur Pemnag lengkap	Peningkatan Kapasitas
2	LPMN	Masih banyak kader LMPN yang Kurang Aktif	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas dan Tambahan Honorarium
3	Pemuda Nagari	Kurangnya Peran Generasi muda terhadap kegiatan Pembangunan Nagari	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas
4	PKK	Jarang Pertemuan anggota	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Tambahan Honorarium
5	KAN	Ninik mamak sama sekali tidak mampu mencontohkan perilaku sopan santun, tau joranggeh kamalantiang.	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Tambahan Honorarium

2.5 Masalah dan Potensi

2.5.1 Masalah

Kondisi yang dihadapi Nagari Kapujan Koto Berapak di era otonomi Nagari ke depan sangat kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang akan ditempuh guna mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat diidentifikasi adanya 6 (enam) issue-isue strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi Nagari saat ini ;

1. Bidang Pemerintahan ; kemampuan aparat yang belum memadai dalam administrasi dan pemahaman yang masih kurang tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif yang membuat pemerintah Nagari masih belum menemukan solusi karena lembaga yang ada tidak mendapatkan bimbingan teknis dan belum sepenuhnya dijalankan dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari, antara lain;

No	Lembaga	Masalah	Potensi	Solusi
1	Bamus Nagari	a. Belum optimalnya fungsi BAMUS Nagari dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.	Pengurus Lengkap	Peningkatan Kapasitas
		b. Belum tersusunnya Peraturan Nagari sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Pengurus Lengkap	Peningkatan Kapasitas
2	Pemerintahan Nagari	a. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan Nagari sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Pengurus Lengkap	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan dan Penambahan Honorarium
		b. Belum optimalnya	SDM Ada	Lengkapi

		penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien		Peralatan
		c. Belum optimalnya kerjasama Nagari dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam	SDM Ada	Lengkapi Peralatan
		d. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah Nagari yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, responsif dan akuntabel belum dapat terwujud	SDM Ada	Pelatihan Perangkat
		e. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan.	SDM Ada	Lengkapi Peralatan
		f. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Nagari, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip	SDM Ada	Pelatihan Perangkat
		g. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip Nagari dan saran prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip Nagari	SDM Ada	Pelatihan Perangkat
		h. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Nagari dan dokumen-dokumen lainnya	SDM Ada	Pelatihan Perangkat
		i. Belum optimalnya partisipasi	Lahan Ada	Peningkatan

		masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan		Kapasitas
		j. Belum optimalnya fungsi kelembangaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat	SDM Ada	Pelatihan Perangkat
		k. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	SDM Ada	Peningkatan Kapasitas
3	Pembangunan	a. Kualitas Jalan yang belum baik	Insfrastruktur Ada	Perbaikan
		b. Sarana Prasarana Areal Pertanian	Insfrastruktur Ada	Perbaikan
		c. Kurang Memadainya sarana Prasarana Pemndidikan	Sarana Ada	Perbaikan
		d. Kurang Memadainya sarana Prasarana Kesehatan	Sarana Ada	Perbaikan
4	Pemberdayaan	Kurangnya Keterampilan pemuda/pemudi putus sekolah	Pemuda Ada	Pelatihan
		Kurangnya Sarana Prasarana Olah Raga	Lahan Ada	Pembangunan Sarana Prasarana
		Kurangnya Sarana Pendukung Kader – Kader Nagari	Kader Ada	Pelatihan

2.5.2 Potensi

Potensi Nagari Kapujan Koto Berapak adalah :

1. Lahan Pertanian

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

1	Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	585 keluarga
2	Tidak memiliki	7 keluarga
3	Memiliki kurang dari 1 ha	390 keluarga

4	Memiliki 1,0-5,0 ha	190 keluarga
5	Memiliki 5,0-10 ha	5 keluarga
6	Jumlah total keluarga petani	585 keluarga

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas tahun 2017

1	Padi sawah	230 ha	3,5 ton/ha
2	Jagung	87 ha	1,80 ton/ha

2. Peternakan

No	Jenis ternak	Jumlah pemilik	Perkiraan jumlah populasi
1	Sapi	300 orang	400 ekor
2	Ayam kampung	100 orang	2.500 ekor
3	Bebek	20 orang	2.000 ekor
Jumlah		420 orang	2.900 Ekor

3. Perikanan

1) Jenis dan sarana perproduksi budidaya ikan air tawar

1	Kolam	3,1 ha/m2	4,8 ton/th
2	Sungai	-	-
3	Sawah	-	-

2) Jenis Ikan dan perproduksi

1	Mujair	0,5 ton/th
2	Nila	2,1 ton/th
Jumlah		2,6 ton/ha

4. Sumber Daya Air

Potensi dan air sumber daya Air

No	Uraian Sumber Daya Air	Volume	Satuan
1	Sungai Bayang Bungo	17.000	M
2	Sungai Batang Bayang	5.500	M
3	Irigasi Pertanian	10.000	M
	Jumlah	32.500	M
4	PAM	2	Unit
5	Pipa	2	Unit
	Jumlah	4	Unit

5. Potensi Sumber Daya Prasarana Dan Sarana Pendidikan

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1	Gedung SMA/Sederajat	0 Buah	
2	Gedung SMP / Sederajat	1 Unit	
3	Gedung SD	2 Unit	
4	Gedung PAUD	3 Unit	
5	Gedung TK	1 Unit	
6	TPQ	2 Unit	
	JUMLAH	9 Buah	

6. Potensi Sumber Daya Prasarana & Sarana Kesehatan

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1	Pustu	1 Unit	
2	Poskesdes	1 Unit	
3	Posyandu	0 Unit	

4	Klinik	0 Unit	
5	Toko Obat	0 Unit	
JUMLAH		2 Unit	

7. Potensi Sumber Daya Prasarana & Sarana Ibadah

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1	Masjid	1 Unit	
2	Musholla	1 Unit	
JUMLAH		3 Unit	

8. Potensi Sumber Daya Pembangunan

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	BAIK	RUSAK
1	Aset Prasarana Umum		
1.1	Jalan		
	Jalan Nagari		
	a. Panjang jalan aspal	1.400 m	0 m
	b. Panjang jalan tanah	1.000 m	1.000 m
	c. Panjang jalan konblok/ semen/ beton	8.000 m	3.000 m
	Jalan Antar Nagari		
	a. Panjang jalan aspal	1.400 m	0 m
	Jalan Kab. Yang Melewati Nagari/Kelurahan		
	a. Panjang jalan aspal	1.400 m	0 m
1.2	Jembatan		
	Jembatan Nagari/kelurahan		
	- Jumlah jembatan beton	0 Unit	0 unit
1.3	Angkutan Darat		
	- Jumlah Pangkalan Ojek	0	0

9. Potensi Sumber Daya Prasarana Dan Sarana Pemerintahan

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1	Kantor Wali Nagari	1 Unit	
2	Sekretaris BAMUS	0 Unit	
3	Gedung P3A	0 Unit	
4	Bumdes	0 Unit	
JUMLAH		1 Unit	

10. Potensi Sumber Daya Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH/ UNIT	KET
1	LPMN	0 Unit	
2	Gapoktan	3 Unit	
JUMLAH		3 Unit	

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1 Pengkajian keadaan Nagari menggunakan sketsa Nagari

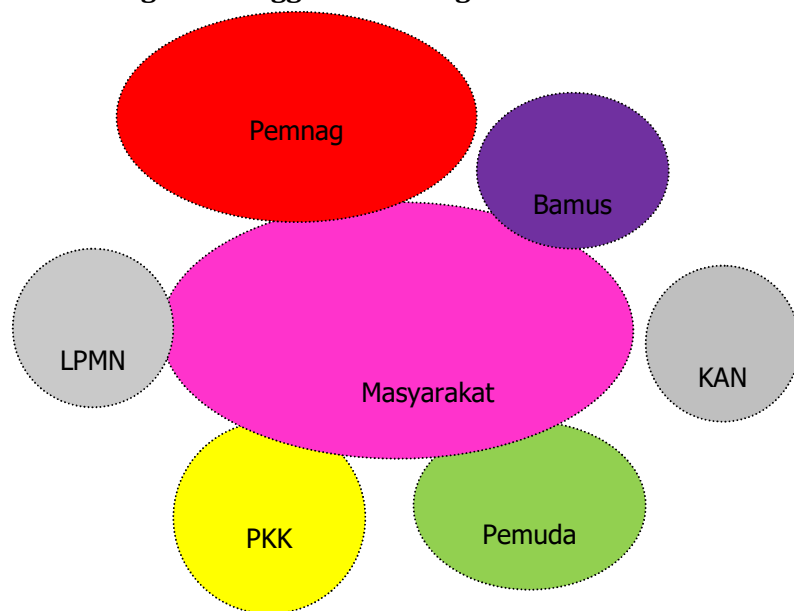
3.1.1 Pengkajian Nagari Menurut Sketsa Nagari

Kp.	Masalah	Potensi	Solusi
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Pendidikan sbb: PAUD / TK : Gedung masih Sewa Sarpras Masih Kurang	Guru, murid dan lokasi ada	Pengngkatan Insfrastruktur
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM, merosotnya mutu generasi karena biaya transportasi sekolah mahal.	Guru, murid dan lokasi ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Kurangnya kesejahteraan guru TPA/TPSA/di Masjid dan di Mushalla	Murid putus sekolah banyak	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Banyaknya anak putus sekolah dan pemuda tidak punya keterampilan khusus dan tidak punya keahlian non formal	Guru dan SDM ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Banyaknya perempuan yang dirumah saja tidak mempunyai keahlian untuk menambah pendapatan rumah tangga	Generasi muda banyak	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Kurangnya ilmu pengetahuan tentang pertanian, sehingga petani sering mengalami gagal panen	ibu-ibu dan pemudi banyak, SDM ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Banyaknya wanita produktif yang tidak punya keterampilan	Sawah luas, perkebunan luas	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Kurangnya kesejahteraan Kader	Sdm ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Kurangnya melembaga nilai-nilai prinsip dalam tata kehidupan bermasyarakat berNagari, (pelatihan adat istiadat)	Guru dan murid ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	Pelatihan tata rias kelompok perempuan	Sdm ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Pelatihan menjahit untuk generasi muda	Sdm ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Kesehatan		
	Banyaknya warga miskin yang belum mendapatkan kartu sehat, Jamkesda, jamkesmas dan BPJS	Warga miskin ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Banyaknya masyarakat tidak berdaya untuk mencari mobil (Tranportasi) ketika menderita sakit / kematian di angkut kerumah sakit, karena ambulan Nagari tidak ada	Puskesmas ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium

	Sarana prasarana Sbb :		
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Di sepanjang jalan alternatif ketika hujan tergenang air disebabkan draenase tidak ada	Sirtukil ada Swadaya	Peningkatan Insfrastruktur
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Tali bandar sawah sering longsor karena masih tanah tidak stabil harus parit miring	Sirtukil ada Swadaya	Peningkatan Insfrastruktur
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Sarana dan prasarana kantor wali Nagari kurang memadai selaku pelayanan masyarakat Nagari antara lain Sempitnya Ruang.	Sirtukil ada	Peningkatan Insfrastruktur
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Mesin pengelola tanah sawah tidak ada untuk kelompok tani sehingga untuk pengeloaan tanah mahal	Lahan dan kelompok tani ada	Penambahan Alat
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Sarana kantor KAN tidak ada sehingga tempat pemufakatan adat menumpang	Lembaga ada	Peningkatan Insfrastruktur
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Banyaknya rumah tidak layak huni	Lokasi ada	Peningkatan Insfrastruktur
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Sarana ibadah masih di pakai untuk TPA/TPSA karena belum ada Gedung TPA/TPSA	Lokasi ada	Peningkatan Insfrastruktur
	Pembinaan sbb :		
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Rabana dan seragam majlis taklim belum cukup	Anggota rabana ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan pemuda kurang memadai Perusahaan yang ada di Nagari Api-api Pasar Baru belum mensejahterakan masyarakat Kerena Upah Rendah	Pemuda ada Perusahaan ada sdm ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Belum sempurnanya lembaga KAN menurut sebagaimana mestinya	Lembaga dan masyarakat ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Pertanian Lahan Pertanian Tadah Hujan,menghambat Pola Tanam Menurunnya hasil panen karena serangan hama	Petani dan lahan pertanian ada	Peningkatan Insfrastruktur
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Susahnya mendapatkan bibit unggul	Petani dan lahan pertanian ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Perkebunan		
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Lahan yang ada belum digarap secara Maksimal dan Masih banyaknya lahan tidur, dikerenakan tanahnya Tandus	Petani dan lahan pertanian ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Peternakan Susahnya mendapatkan bibit sapi smental serta usaha pengemukan Sulitnya masyarakat dalam pengelolaan pakam ternak	peternak dan lahan peternakan ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Susahnya masyarakat mendapatkan bibit itik gurun	peternak dan lahan peternakan ada	
	Perikanan		
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Tidak bermanfaatnya lubuk Larangan sebagai sumber ekonomi masyarakat dikernakan belum adanya perawatan lahan, Bibit dan	peternak dan lahan peternakan ada	Penanaman Modal

	pakam ikan		
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Tidak bermanfaatnya Lubuk Larangan karena kurangnya bibit dan pakam	dan lahan ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Kehutanan Banyaknya hutan Belukar karena tidak ada penanaman kembali karena susah nya mendapatkan bibit kayu jati dan kayu Harmoni	Petani dan lahan pertanian ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Belum adanya Ketentuan Batas Tanah ulayat Nagari dengan tanah Masyarakat kerena Tidak adanya Legalitas (Pernag)	lahan ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium
	Ekonomi		
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Belum adanya Pemasaran Hasil Usaha Sirup Palo dari Kelompok Bayang Bungo Usaha menjahit dan perbengkelan tidak berkembang	Pengusaha dan jasa ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Sulitnya mendapatkan modal untuk perkembangan warung dan baru sebagian yang terbiaya oleh kelompok SPP	Sdm ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Kelompok SPP yang tambahan modal	Sdm ada	Penanaman Modal
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Sulitnya masyarakat membangun rumah karena pengambilan kayu Kerena Hutan Brlukar Tidak adanya Kayu	Lokasi perumahan ada	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	Masih banyaknya Masyarakat Miskin yang ingin Mendapatkan RASTRA dalam pembagian beras raskin karena pasokan beras sangat kurang	Penerima banyak	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penambahan Honorarium
Kp. Kapujan Kp Parit Rantang	kelompok perempuanan sebagian tidak punya modal karena tidak punya boroh anggungan	SDM ada	Penanaman Modal

3.1.2 Pengkajian keadaan Kelembagaan menggunakan Diagram Venn



No	Lembaga	Masalah	Potensi	Solusi
1	Pemerintahan Nagari	Bamus belum Mampu merumuskan Aturan-aturan Nagari (Pernag)	Struktur Pemnag lengkap	Peningkatan Kapasitas
2	LPMN	Masih banyak kader LMPN yang Kurang Aktif	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas dan Tambahan Honorarium
3	Pemuda Nagari	Kurangnya Peran Generasi muda terhadap kegiatan Pembangunan Nagari	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas
4	PKK	Jarang Pertemuan anggota	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Tambahan Honorarium
5	KAN	Ninik mamak sama sekali tidak mampu mencontohkan perilaku sopan santun, tau joranggeh kamalantiang.	Kepengurusan lengkap	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Tambahan Honorarium

3.1.3 Pengkajian keadaan Nagari menggunakan Kalender Musim

3.1.3.1 Gambar Kalender Musim

No	Masalah Kegiatan Keadaan	Kemarau							Hujan				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okto	Nov	Des
1	Banjir										***	***	***
2	Kekeringan				***	***	***						
3	Kekurangan Air Bersih					***	***	***					
4	Musim Tanah	***				***				***			
5	Panen				***				***				***
6	Penyakit Akibat Musim Hujan										***	***	***
7	Kekurangan Pangan						***	***					

Ket : *** (Periode Masalah, Kegiatan dan Keadaan)

3.1.3.2 Daftar Masalah Dari Kalender Musim

No	Masalah	Potensi
	Pada Musim Kemarau Nagari Kapujan Kekeringan	a) Sungai b) Mata Air c) Swadaya Masyarakat
	Pada Musim Kemarau Hasil Panen Merosot	a) Irigasi b) Luas Area Pertanian c) Gapoktan
	Pada Musim Kemarau Nagari Kapujan Kekurangan Air Bersih	a) PDAM b) Sungai c) Mata Air d) Swadaya Masyarakat
	Pada Musim Hujan Nagari Kapujan Kebanjiran	a) Batu Kayu b) Sungai c) Gotong Royong
	Pada Musim Hujan Banyak Warga Kena Penyakit	a) Puskesmas Pembantu b) Bidan Desa c) Kader Kesehatan d) Kebun Obat Keluarga

3.1.4 Pengelompokan Masalah

No	Masalah	Potensi	Lokasi	Solusi
	A. Pendidikan		N	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	1. Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM, merosotnya mutu generasi karena biaya transportasi sekolah mahal.	Murid putus sekolah banyak	A	
			G	
	2. Kurangnya kesejahteraan guru TPA/TPSA/di Masjid dan di Mushalla	Guru, murid, ada	A	Penambahan Honorarium
			R	
	3. Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini	Guru dan SDM	I	Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	4. Banyaknya anak putus sekolah dan pemuda tidak punya keterampilan khusus	Generasi muda		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan

	dan tidak punya keahlian non formal	banyak	K A P U J A N	
	5. Banyaknya perempuan yang dirumah saja tidak mempunyai keahlian untuk menambah pendapatan rumah tangga	ibu-ibu dan pemuda banyak, SDM ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	6. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang pertanian, sehingga petani sering mengalami gagal panen	Sawah luas, perkebunan luas		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	7. Banyaknya wanita produktif yang tidak punya keterampilan	Sdm ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	8. Kurangnya kesejahteraan Kader	Guru dan murid ada		Penambahan Honorarium
	9. Kurangnya melembaga nilai-nilai prinsip dalam tata kehidupan bermasyarakat berNagari, (pelatihan adat istiadat)	Sdma ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	B. Masalah Kesehatan sbb :			
2	1. Air bersih belum memadai	Lokasi ada		Peningkatan Infrastruktur
	2. Banyaknya warga miskin yang belum mendapatkan kartu sehat, Jamkesda, jamkesmas	Warga miskin ada		Perbaikan Pelayanan
	3. Penyakit mutaber selalu berkembang ketika musim kemarau panjang karena warga membuang hajat dan sampah ke sungai	Lingkungan ada		Peningkatan Kapasitas, Pembinaan
	4. Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, (Sukarela)	Kader ada, posyandu ada		Penambahan Honorarium
	5. Mobiler posyandu tidak ada	Posyandu dan kader ada		Peningkatan Infrastruktur
	6. Kelompok lansia kurang terurus	Lansia ada		Perbaikan Layanan
	7. Kurangnya gizi Lansia, balita dan anak usia dini	Lansia, anak usia dini ada		Perbaikan Layanan
	8. Rusaknya pemukiman masyarakat ketika banjir	Sirtukil ada		Peningkatan Infrastruktur

	9. Di khawatirkan masyarakat mendapatkan penyakit rabies karena banyaknya anjing suka menggigit (tidak terurus) berkeliaran di Kp.	Anjing ada		Peningkatan Kapasitas, Pembinaan
3	Masalah Sarana Prasarana Sbb :			
	1. Insfrastruktur Banyak yang rusak	Lokasi siap pembebasan lahan		Peningkatan Insfrastruktur
	2. Jalan berlobang dan masih ada jalan tanah	Sirtukil ada		Peningkatan Insfrastruktur
	3. Jalan masih kecil dan sulit untuk kendaraan berselisih	Sirtukil ada		Peningkatan Insfrastruktur
	4. Sampah setiap hari di buang kesungai karena tidak ada tempat pembuangan sampah (TPS)	Lokasi ada		Peningkatan Insfrastruktur
	5. Di sepanjang jalan alternatif ketika hujan tergenang air disebabkan drenase tidak ada	Sirtukil ada		Peningkatan Insfrastruktur
	6. Tali bandar sawah sering longsor karena masih tanah tidak stabil harus parit miring	Sirtukil ada		Peningkatan Insfrastruktur
	7. Sarana dan prasarana kantor wali Nagari tidak memeadai selaku pelayanan masyarakat Nagari antara lain halaman sempit tidak adatempat parkir	Sirtukil ada		Peningkatan Peralatan dan Mesin
	8. Mesin pengelola tanah sawah tidak ada untuk kelompok tani sehingga untu pengeloan tanah mahal	Lahan dan kelompok tani ada		Peningkatan Peralatan dan Mesin
	9. Sarana kantor KAN tidak ada sehingga tempat pemufakatan adat menumpang	Lembaga ada		Peningkatan Insfrastruktur
	10. Banyaknya rumah tidak layak huni	Lokasi ada		Peningkatan Insfrastruktur
	11. Sarana ibadah masih di pakai untuk TPA/TPSA karena belum ada Gedung	Lokasi ada		Peningkatan Insfrastruktur
	12. Renovasi kantor kepala desa lama akan di jadikan gedung serbaguna	Sirtukil ada		Peningkatan Insfrastruktur

	13. Sumber air bersih pipanya rusak berat	Lokasi ada		Peningkatan Infrastruktur
	14. Sering terjadi kecelakaan karena jalan alternatif terlalu sempit	Lokasi siap pembebasan lahan		Peningkatan Infrastruktur
	15. Normalisasi batang bayang dan bayang bungo untuk mengatasi banjir	Lokasi dan sirtukil ada		Peningkatan Infrastruktur
4	Masalah Sosial budaya sbb:			
	1. Rabana majlis taklim belum ada	Anggota rabana ada		Peningkatan Sarana Prasarana
	2. Hilangnya kesenian tradisional	Adm ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	3. Tidak adanya sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan pemuda	Pemuda ada		Peningkatan Infrastruktur
	4. Usaha sirup pala yang ada di Kampung Parit Rantang belum mensejahterakan masyarakat	Perusahaan ada sdm ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
	5. Belum sempurnanya lembaga KAN menurut sebagaimana mestinya	Lembaga dan masyarakat ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
B	Masalah Pertanian			
1	Pertanian	Petani dan lahan pertanian ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
	1. Menurunnya hasil panen karena serangan hama			
	2. Susahnya mendapatkan bibit unggul yang tahan hama wereng	Petani dan lahan pertanian ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
2	Perkebunan			
	1. Susahnya masyarakat mendapatkan bibit gambir, pala, kopi, semangka, jagung, kacang dan cengkeh unggul	Petani dan lahan pertanian ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
3	Peternakan			
	1. Susahnya mendapatkan bibit sapi smental	peternak dan lahan peternakan		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan,

	serta usaha pengemukan	ada		Penanaman Modal
	2. Sulitnya masyarakat dalam pengelolaan pakam ternak			
	3. Susahnya masyarakat mendapatkan biit itik gurun	peternak dan lahan peternakan ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
4	Perikanan sbb:			
	1. Tidak bermanfaatnya lubuk sebagai sumber ekonomi masyarakat (Biit dan pakam ikan)	peternak dan lahan peternakan ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
	2. Tidak bermanfaatnya kolam masyarakat karena kurangnya bibit dan pakam	peternak dan lahan peternakan ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
5	Kehutanan sbb:			
	1. Banyaknya hutan gundul karen tidak ada penanaman kembali karena susahnya mendapatkan bibit	Petani dan lahan pertanian ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
	2. Tanah ulayat Nagari dialih fungsikan untuk taman kerinci seblan (TNKS) ketika dipandang patok batas sangat dekat dengan pemukiman masyarakat dan peladangan masyarakat	Petani dan lahan pertanian ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
6	Ekonomi sbb:			
	1. Usaha menjahit dan perbengkelan tidak berkembang	Pengusaha dan jasa ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
	2. Silitnya mendapatkan modal untuk perkembangan warung dan baru sebagian yang terbiaya oleh kelompok SPP	Sdm ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
	3. Kelompok SPP yang ada perlu tambahan modal	Sdm ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal

	4. Hutan TNKS mengandung sumberdaya alam, emas, perak, tembaga tidak boleh di olah sehingga tidak bermanfaat bagi msyarakat	Sdm ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
	5. Sulitnya masyarakat membangun rumah karena pengambilan kayu terlarang	Lokasi perumahan ada		Penanaman Modal
	6. Susahnya dalam pembagian beras raskin karena pasokan beras sangat kurang	Penerima banyak		Peningkatan Layanan
7	Koperasi dan usaha masyarakat sbb :			
	1. waktu pesta pelaminan selalu didatangkan dari luar Kp.	Bundo kandung ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal
	2. kelompok perempuan sebagian tidak punya modal karena tidak punya boroh anggunan	SDM ada		Peningkatan Kapasitas, Pelatihan, Penanaman Modal

Nagari Kapujan Koto Berapak telah memperoleh sejumlah kemajuan dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis. Indikator pengentasan kemiskinan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat Nagari. Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh masyarakat Nagari Kapujan Koto Berapak secara umum adalah bagaimana membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pendidikan dan kesehatan, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, mengurangi tingkat kemiskinan, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan Nagari, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Bidang Pendidikan

Merupakan salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral bersama-sama dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini Nagari Kapujan Koto Berapak masih ada warga yang buta aksara, warga usia sekolah yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi karena terbentur dengan biaya, masih banyak warga masyarakat usia dini yang belum tersentuh

oleh pendidikam karena terbatasnya akses pendidikan usia dini di Nagari. Kegiatan belajar mengajar taman kanak-kanak dan Sekolah Menengah yang dikelola oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Pendidikan Usia Dini (PAUD) masih di kelola denga swadaya masyarakat, di Nagari KAPUJAN KOTO BERAPAK sudah berjalan dan sudah beberapa kali menamatkan siswa-sisiwinya dalam tiap tahun anggaran namum masih terbentur dengan belum tersedianya sarana gedung untuk belajar dan menggajar yang saat ini masih numpang dirumah warga . Bidang pendidikan agama untuk warga masyarakat masih di kelola dan di pasilitasi oleh Taman Pendidikan Al-Qura'an (TPQ) di masing-masing dusun dengan beberapa permasalahan antara lain keterbatasan Sumber Daya manusianya, keterbatasan sarana gedung dan keterbatasan sarana pendukung kelengkapan belajar mengajarnya.

Bidang Kesehatan

- Di Nagari Kapujan Koto Berapak ada beberapa indikator yang menjadi perioritas penanganan yang menjadi permasalahan serius di tengah masyarakat seperti masyarakat yang belum memahami dan belum mencerminkan Perilaku Hidup Bersih (PHBS) karena masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan karena belum tersedianya tempat pemuangan sampah (TPS), masih banyak warga lansia belum mendapat pasilitaas pealayanan kesehatan, di posyandu wilayah Nagari Kapujan Koto Berapak masih banyak pencapaian target yang masih belum tercapai untuk kesehatan balita dan ibu hamil dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat Nagari.
- Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat Nagari walaupun trendnya-nya cenderung meningkat menurut data kabupaten yakni pada tahun 2008 mencapai 59,97 tahun meningkat menjadi 61,28 tahun pada tahun 2011.

Bidang Sosial Budaya

Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai budaya serta kearipan local dalam pembangunan belum optimal. Budaya dan kearipan local yang ada sebatas event, vestipal, dan kegiatan serimonial saja yang belum mampu masyarakat wujudkan secara sistimatis diaktualisasikan dalam pogram pembangunan Nagari. Permasalahan yang dihadapi seperti terkikisnya nila-nilai gotong-royong, masih kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Nagari baik dalam peruses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan pembangunan danpemeliharaanya.

Bidang Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian yang masih di hadapi adalah masih belum optimalnya fungsi lembaga yang bergerak di bidang pertanian seperti Gabungan kelompok Tani (GAPOKTAN), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kelompok Tani Nagari, Pola tanam petani masih belum teratur, Program yang diterima dari pemerintah daerah masih banyak yang belum mencapai sasaran, sehingga berdampak kepada hasil pertanian yang masih rendah yang belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat petani di Nagari KAPUJAN KOTO BERAPAK. Untuk Sarana Persarana pertanian sudah banyak yang sudah tersedia seperti Hand traktor, bantuan pupuk, bantuan bibit dan saluran irigasi yang sudah di bangun untuk kelancaran pengairan bagi petani.

Bidang kemasyarakatan

- a) Permasalahan yang masih ada sampai saat ini adalah masih banyak warga Nagari KAPUJAN KOTO BERAPAK belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya untuk memiliki rumah yang layak huni dan sehat menurut setandar keshataan.
- b) Masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan akses sarana air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
- c) Masih banyak warga masyarakat yang tidak mempunyai sarana Mandi Cuci Kakus (MCK).

Bidang Ekonomi

Permasalahan yang di hadapi Nagari KAPUJAN KOTO BERAPAK sampai saat ini adalah taraf kehidupan kesejahteraan warga masyarakat Nagari yang masih dikategorikan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah di lihat dari mata pencaharian warga yang masih bekerja menjadi buruh harian lepas, pedagang kecil, dan sector kecil lainnya. Beberapa faktor penyebabnya adalah masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, serta kurangnya modal untuk berusaha sehingga belum mampu untuk bersaing mencari nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Bidang Lingkungan hidup

- a) Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan masih kurang perdulinya masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara mandiri mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sampai saat ini pemerintah Nagari belum mampu mengimbangi

keterangkutan dan pengelolaan sampah karna belum memiliki mobil pengangkut sampah, belum memiliki tempat pembuangan sampah dan belum ada masyarakat yang mampu secara berkelanjutan dalam pengelolaan daur ulang sampah.

- b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya alam serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan yang masih belum produktif.

Bidang Kependudukan

- 1) Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk yang lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
- 2) Ketimpangan persebaran penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis.
- 3) Pertambahan penduduk di Nagari KAPUJAN KOTO BERAPAK grafiknya cenderung meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49%/tahun, ini belum diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- 4) Kepemilikan Administrasi Kependudukan masih rendah, baik dalam hal Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta-akta kependudukan lainnya.
- 5) Tercatat tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 mencapai 4,16% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 61,72%. Jika di lihat dengan kesempatan kerja yang tersedia yang mencapai 95,84%, seharusnya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat di tingkatkan hingga mencapai 95%. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal selama kurun waktu enam tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, di harapkan Nagari KAPUJAN KOTO BERAPAK akan dapat mempertahankan prestasi-prestasi pembangunan yang telah di capai bahkan mampu meningkatkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari;

Musyawarah Nagari dilaksanakan setelah adanya Laporan Hasil Pengkajian Nagari oleh Tim Penyusun RPJM, Musyawarah Menyepakati beberapa hal, diantaranya ; menyepakati Hasil

Pengkajian Nagari; Menyepakati Arah Kebijakan Pembangunan Nagari untuk 6 (enam) tahun kepemimpinan Walinagari yang mengacu pada Visi dan Misi Walinagari.

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1 Visi

Dengan memperhatikan amanat RPJM Nagari Kapujan Koto Berapak serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi pembangunan Pemerintah Nagari Kapujan Koto Berapak tahun 2018- 2024 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT BERKEPRIBADIAN DAN SEJAHTERA”

Penjabaran makna Visi Nagari Kapujan Koto Berapak tersebut adalah sebagai berikut

1. Religius maknanya : Nagari yang bersendikan agama dalam penyelesaian berbagai masalah kekeluargaan dan mengarahkan masyarakat kearah pendidikan yang bernuansakan agama yang dianutnya.
2. Mandiri artinya : Mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang di miliki serta mampu mengelola dan mencari sumber dana dalam mendukung pembangunan.
3. Berdaya saing artinya : Masyarakat Nagari Kapujan Koto Berapak mampu melaksanakan pembangunan yang sejajar dan sportif tanpa merugikan pihak manapun.
4. Madani artinya : Dalam menjalankan perikehidupan bermasyarakat tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip tradisi dan adat budaya lokal dan norma yg berlaku di masyarakat.

4.2 Misi

Dalam rangka pencapaian misi yang telah di tetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang di miliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut

- 1) Mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
- 2) Menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

- 3) Mengembangkan, Menerapkan, dan mempertahankan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Mempercepat pembangunan Inprastruktur strategis (Jalan, Sekolah, Jaringan Listrik, Sumber Daya Air) untuk menunjang kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan budaya sesuai potensi daya dukung lingkungan.
- 5) Meningkatkan daya usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan
- 7) Mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan dalam mewujudkan stabilitas keamanan.
- 8) Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan dan penguatan sector usaha kecil, menengah dan koperasi
- 9) Meningkatkan pelayanan masyarakat, supaya tercapainya perilaku hidup sehat dan menunjang pembangunan.
- 10) Mewujudkan, mengembangkan dan mendorong iklim usaha yang kondusif sebagai basis pertumbuhan ekonomi nagari
- 11) Membebaskan Nagari Kapujan Koto Berapak dari segala bentuk penyakit masyarakat (Togel, Miras, Narkoba, Pornografi/Porno Aksi dan Pergaulan Bebas)
- 12) Mengembangkan kawasan wisata dan memelihara cagar budaya yang berwawasan lingkungan
- 13) Pemberdayaan Institusi Lokal sebagai basis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan
- 14) Mengembangkan sector pertanian, perikanan dan perkebunan.
- 15) Mempertahankan dan melaksanakan koserfasi lingkungan hutan.
- 16) Memanfaatkan dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam melalui kegiatan Agrowisata

4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Rencana kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nagari selama enam tahun bagi Nagari Kapujan Koto Berapak. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari empat dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat Nagari. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nagari sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan sehari – hari selama 6 tahun kedepan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM – Nagari) ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya menyesuaikan dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi Nagari dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Nagari Kapujan Koto Berapak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat di rumuskan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Kapujan Koto Berapak kurun waktu enam tahun ke depan yang di klarifikasikan dalam 3 aspek pembangunan, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Nagari

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Kapujan Koto Berapak, sejumlah isu yang ditetapkan masuk aspek kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

- a) Gangguan kamtibmas bernuansa SARA masih berpotensi terjadi.
- b) Pertumbuhan ekonomi Nagari yang belum optimal.
- c) Angka kemiskinan masih tinggi.
- d) Relatif tingginya angka pengangguran.
- e) Angka buta huruf masih tinggi.
- f) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah.
- g) Usia harapan hidup masih rendah.
- h) Rumah tidak layak huni masih tinggi.

2. Aspek Pelayanan Umum

Dalam rangka berupa memperbaiki pelayanan umum sebagai tugas utama penyelenggaraan pemerintahan, dapat di uraikan beberapa isu di bawah ini:

- a) Penegakan Perdes belum optimal.
- b) Pelaksanaan tugas pemerintahan yang bersih dan baik belum optimal.
- c) Penyelenggara administrasi pelayanan publik masih belum optimal.

- d) Masih kurangnya target pencapaian di 4 Posyandu.
- e) Masih tingginya kasus kematian ibu.
- f) Masih terdapatnya prevalensi kurang gizi.
- g) Meningkatnya insidensi HIV dan AIDS.
- h) Masih rendahnya minat baca dan kunjungan ke perpustakaan Nagari.
- i) Rumah tangga yang menggunakan air bersih masih rendah.
- j) Rumah tangga yang menggunakan listrik masih rendah.
- k) Penyediaan jaringan irigasi belum optimal.
- l) Rumah tangga dengan sanitasi layak masih rendah.
- m) Pencemaran kualitas air sungai masih tinggi.
- n) Konservasi sumber mata air belum optimal.
- o) Pengelolaan sampah belum optimal.
- p) Masih terdapatnya penambangan tanpa ijin.

3. Aspek Daya Saing

Sebagai ikhtiar pemerintah Nagari dalam meningkatkan daya saing, beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- a) Peningkatan pendapatan asli Nagari belum optimal
- b) Nilai investasi Nagari masih rendah
- c) Rendahnya pertumbuhan industri kecil
- d) Kemantapan jalan belum optimal.
- e) Pemanfaatan ruang yang sesuai Kampung belum terlaksana.

Secara umum, isu strategis yang di hadapi oleh Nagari Kapujan Koto Berapak ke depan dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a) Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan aktualisasi budaya.
- b) Pemerataan infrastruktur wilayah.
- c) Angka kemiskinan dan masalah sosial.
- d) Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
- e) Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan Nagari.
- f) Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

STRATEGI PEMBANGUNAN NAGARI

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Nagari Kapujan Koto Berapak sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan pembangunan Nagari, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan beberapa sumber pendanaan, baik pemerintahan pusat, daerah maupun Nagari seperti PAD, Dana Nagari, Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Nagari, Bantuan keuangan dan Hibah dari Pemerintah Pusat (APBN) Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) Pemerintah Daerah (APBD kabupaten), Swadaya masyarakat maupun bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat serta dana lainnya. Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh Nagari. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas Nagari, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah dan Dana Nagari.

Pelaksana Kegiatan Nagari masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada dengan dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Nagari, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Polindes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah dan Ibu – Ibu PKK, bidang pertanian dikoordinir oleh POKTAN, GAPOKTAN dan HIPPA dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh BUMNag dan Kelompok SPP serta PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan Nagari yaitu Karang Taruna.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta target dan capaian akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak

4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamus
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Kebijakan pembangunan Nagari yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 aspek mendasar, yaitu :

a. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI

Menyelenggarakan pemerintahan Nagari yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1 Pembayaran penghasilan Tetap dan Tunjangan
- 2 Kegiatan Operasional Kantor Nagari
- 3 Kegiatan Operasional BAMUS
- 4 Kegiatan Pengelolaan keuangan Nagari
- 5 Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Nagari
- 6 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari
- 7 Kegiatan Pendataan Nagari
- 8 Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Nagari
- 9 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Nagari
- 10 Kegiatan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 11 Kegiatan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintahan Nagari
- 12 Kegiatan Pemilihan Kepala Nagari
- 13 Kegiatan Pengisian Perangkat Nagari
- 14 Kegiatan pembentukan dan Pengisian BAMUS
- 15 Kegiatan Intensifikasi PBB

- 16 Kegiatan Penataan Nagari
- 17 Kegiatan Penetapan dan penegasan batas Nagari
- 18 Kegiatan Evaluasi Tingkat perkembangan Nagari
- 19 Kegiatan Lomba Nagari
- 20 Kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Nagari
- 21 Pengelolaan informasi Nagari
- 22 Penyelenggaraan kerja sama antar Nagari

b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Melaksanakan pembangunan infrastruktur Nagari, Infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana Perekonomian Nagari, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi
2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Nagari
3. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase
4. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
5. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Nagari
6. Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, dan Pembinaan Posyandu
7. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
8. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
9. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
10. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
11. Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Nagari
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Ekonomi Nagari

12. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
13. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
14. Kegiatan Penunjang Pembangunan Nagari

c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu Pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan Nagari
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
3. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
4. Kegiatan Pembinaan Kesenian
5. Kegiatan Pembinaan Kesenian Lokal lainnya
6. Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian tradisi, sosial dan budaya
7. Kegiatan Pembinaan Keagamaan
8. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
9. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
10. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
11. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
12. Kegiatan Penunjang Pembinaan Kemasyarakatan

d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan

1. Kegiatan Pelatihan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS
2. Kegiatan Pembekalan Pelaksana Kegiatan
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Nagari
4. Kegiatan Pember Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

5. Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat
6. Kegiatan Pelatihan Perangkat Nagari
7. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
8. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
9. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana
10. Kegiatan Pemberdayaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
11. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari dan Usaha Nagari lainnya
12. Kegiatan Penunjang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) ini diharapkan akan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan pembangunan di Nagari Kapujan Koto Berapak untuk jangka waktu enam tahun kedepan.

Demikian pula kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan segenap SKPD-nya diharapkan untuk dapat memadukan program masing-masing dengan program pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMNag ini.

RPJM Nagari merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Nagari Kapujan Koto Berapak Kecamatan Bayang tahun 2018 -2024 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua Tim Penyusun dan Tim Pendamping Perdesaan Kecamatan Gunungsari serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terlibat dalam Penyusunan RPJMNag ini, semoga semua ini akan mampu membawa perubahan yang jauh lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya.